

**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI
DESA SEBEMBAN KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Jubiansyah,¹ Budiman

**eJournal Ilmu Pemerintahan Volume ,
Nomor , 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul Skripsi : Kinerja Pemerintah Desa Dalam
Pembangunan di Desa
Sebeman Kecamatan Muara.wis
Kabupaten KutaiKartanegara

Nama : Jubiansyah

NIM : 1502025120

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1
Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 03 November 2022

Pembimbing I



Budiman S.IP., M.Si
NIP. 19770712 200501 1 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PROGRAM STUDI S1 FISIPOL

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Ilmu Pemerintahan	Bagian Program Studi
Volume	:	Ilmu Pemerintahan
Nomor	:	
Tahun	:	
Halaman	:	

**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA SEBEMBAN KECAMATAN
MUARA WIS. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jubiansyah¹

Abstrak

Jubiansyah Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Sebeban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Di bawah Bimbingan Bapak Budiman S.IP, M.Si.

Pemerintah desa terlibat dan mampu melakukan administrasi, pengembangan masyarakat, pengembangan, dan pemberdayaan komunitas desanya yang berada di bawah lingkungannya. Mengingat hal ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas administrasi desa dalam menumbuhkan pertumbuhan di Sebeban, Distrik Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode kualitatif digunakan untuk pengumpulan data, presentasi, dan analisis penelitian ini untuk memberikangambaran holistik tentang masalah yang sedang dipertimbangkan. Metode pengumpulan informasi, termasuk wawancara, pengamatan, dan catatan tertulis. Temuan ini didasarkan pada wawancara dengan lima sumber:

Seseorang yang mengisi peran sebagai Kepala Desa Penjabat, Direktur Bangunan dan Perencanaan, Manajer Perencanaan Jangka Panjang, dan Manajer Pemeliharaan Jangka Panjang. Menggunakan kerangka kerja empat bagian untuk analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Metode Saldana: (1) mendapatkan data, (2) menganalisis data, (3) menyajikan data, dan (4) menyimpulkan hasil.

Kinerja adalah hasil akhir dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang akan dicapai oleh seorang individu selama melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditugaskan kepadanya, dan Menurut data, pemerintah desa melakukan pekerjaan yang baik dalam mendorong pertumbuhan masyarakat. Dari apa yang dapat kami katakan, pemerintah desa Sebeban melakukan pekerjaan dengan baik secara keseluruhan, tetapi kami tahu bahwa pengawasan yang lebih kuat dapat menjadi lebih baik berkat studi kami.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan Masyarakat Desa

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jubiansyah12@gmail.com

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengubah system penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Kesiapan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebuah pembangunan tidak terlepas dari adanya campur tangan anggota pemerintah desa, penataan terhadap sistem pemerintahan sehingga mewujudkan adanya pembangunan desa yang efektif dan efisien, transparasi, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Menurut pembahasan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 sebelumnya, yang dimaksud dengan “Pemerintahan Desa” adalah suatu tingkatan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengurus penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa adalah badan formal dari kesatuan masyarakat desa; itu adalah wewenang dan kekuasaan yang didelegasikan dari pemerintah pusat, dan desa itu sendiri berfungsi sebagai focal point untuk semua konstituen desa. Untuk lebih mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperluas kemampuan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pembukaan undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan Desa merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Desa sebemban merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di pinggir bataran sungai Mahakam. Penduduk yang tinggal didesa sebemban mata pencaharian adalah bertani dan nelayan. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di Desa Sebemban Kec. Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal pembahasan bagaimana kinerja yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa saat ini hasil kurang. Hal tersebut bisa dilihat dari program-program yang di bangun oleh pemerintah Desa sangat kurang efisien dan tidak tepat sasaran. Bisa dilihat pada masalah pembangunan kantor desa yang semula berada di rt 02 di pindah ke rt 04, dimana pemerintah desa membangun kantor desa yang baru. Sedangkan kantor desa yang lama masih dalam kondisi masih bagus, tetapi tidak dirawat dan dijadikan tempat penyimpanan barang atau gudang, seharusnya bangunan tersebut masih bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah desa. Pembangunan fisik dan non fisik dari program-program yang telah dilaksanakan di Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis masih belum optimal, hal ini berdampak pada hasil kerja yang dicapai oleh pemerintah desa. Keberhasilan program setelah dilaksanakan

oleh pemerintah desa merupakan indikator yang baik tentang seberapa baik kepala desa telah memimpin pemerintah desa dalam hal-hal seperti perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara efisien dan tepat sasaran.

Kerangka Dasar Teori

Kinerja

Secara alami, proses, hasil, dan kegunaan tidak dapat dianggap terpisah dari masalah kinerja. Dalam konteks ini, kinerja (prestasi kerja) merujuk pada hasil akhir dari upaya seorang pegawai untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan baginya. Menurut Harbani Pasolong (2010 : 197) bHarbani Pasolong (2010:197) mengutip Tur & Byars yang menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil, untuk mendukung pernyataan bahwa kinerja seseorang yang melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil adalah tingkat pencapaian hasil tersebut. Mangkunegara, dikutip oleh Harbani Pasolong (2010: 197), mendefinisikan kinerja sebagai hasil akhir dari upaya individu untuk memenuhi peran dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dari Lembaga administrasi Negara republik Indonesia disingkat LAN-RI (2010:197) memutuskan kinerja adalah bentuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan antara lain program kebijakan dalam mewujudkan sasaran atau tujuan misi dan visi dari organisasi itu sendiri.

Mengutip dari pendapat beberapa para ahli dan lembaga di atas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pengertian genetika dalam penelitian ini adalah suatu hasil kinerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna mewujudkan tujuan lembaga. Menurut Mangkunegara yang dikutip oleh Harbani pasolong (2010:197) yaitu mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja yang dicapai secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Keban yang dikutip oleh harbani (2010:197) kinerja adalah merupakan tingkat pencapaian tujuan. titik sedangkan yang dikutip oleh Harbani pasolong (2010:197) kinerja adalah prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. Mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dilihat atau dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu lembaga dan organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan bekerja

sesuai dengan moral dan etika.

Pemerintah

Kubernan, kata Yunani untuk nakhoda kapal, adalah tempat kita mendapatkan gagasan tentang pemerintahan, yang berarti "mengarahkan ke depan" (Surbakti 2007:167). Memerintah berarti memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan, memutuskan kebijakan mana yang akan diberlakukan untuk membawa hasil yang diinginkan bagi warga negara, merencanakan langkah logis berikutnya dalam pembuatan kebijakan sehubungan dengan masa depan itu, dan memimpin orang-orang yang pilih. Bertanggung jawab untuk membimbing menuju akhir yang telah ditentukan. Pemerintahan, menurut Handoyo (2010: 81), adalah proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik untuk kepentingan masyarakat dan negara. memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat dan mengelola atau mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemerintah, dengan demikian, berupa pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat dan negara (Handoyo 2010:81). Harbani pasolong (2010:207) yaitu mengatakan bahwa secara teoritik penilaian kinerja sangat erat hubungannya dengan analisis pekerjaan. artinya suatu penilaiannya tidak dapat dilakukan jika terdapat ketidakjelasan kepada pekerjaan itu sendiri.

Dan berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja dalam kurung kinerja yaitu penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil kerja karyawan dalam kinerja organisasi atau lembaga. Selain itu juga menentukan pelatihan kerja secara tepat untuk memberikan kualitas yang lebih baik dimasa yang mendatang dan menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan dan penentuan imbalan.

Pembangunan

Dalam rangka memajukan kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dan lain sebagainya, pemerintah seringkali mengadakan program berbasis masyarakat dengan tujuan mendorong pertumbuhan. Desa merupakan titik pusat pembangunan nasional, sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2005:108), yang mendefinisikan Pembangunan Desa sebagai seluruh rangkaian usaha yang dilakukan di lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penghidupan masyarakat desa dan peningkatan kesejahteraan di desa. pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama, dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional".

Sedangkan menurut Suparno (2001:46) menegaskan bahwa “pembangunan desa/kelurahan dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat . Kewajiban pemerintah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri”. Berikut ini dari isi Undang-undang ialah, Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang Pembangunan Desa :

1. Pembangunan desa untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas, serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, sumber daya alam dari lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan desa pada ayat (2) mengedepankan kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan kesejahteraan.
4. Perdamaian dan keadilan sosial.

Dari yang dikemukakan ini dapat peneliti artikan pembangunan desa merupakan rangkaian usaha atau kegiatan bersama dari berbagai pihak yaitu pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama dalam meningkatkan pembangunan itu sendiri. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat dengan identitasnya sendiri dan camatnya sendiri yang berwenang mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini adalah salah satu tingkat pemerintahan terendah. Menurut Hanif Nurcholis (2011:2) Desa adalah tempat orang mengenal satusama lain, di mana ada budaya gotong royong, di mana orang berbagi adat istiadat yang sama, dan di mana ada cara yang mapan untuk mengatur kehidupan sosial. Bertani dan menangkap ikan merupakan mata pencaharian utama penduduk desa. Sebagian besar penduduk di desa pesisir bermatapencaharian sebagai nelayan, sedangkan penduduk di desa pedalaman bermatapencaharian dengan bertani sawah dan kebun. Undang-undang 2014 tentang Desa pasal 1, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut I. Nyoman Beratha dalam Hanif Nurcholis (2011:4) Desa adalah Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melindunginya.

Berdasarkan penjelasan kedua para ahli tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya

menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiyadat sehigga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masingarganya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian, Sugiyono (2017:2) Sederhananya, metode penelitian adalah pendekatan metodis untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Mengingat hal ini, penting untuk mengingat empat istilah berikut: metode ilmiah; data; hasil yang diinginkan; aplikasi praktis. “Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,” tulis Bogdan dan Taylor, dikutip Lexy J.Moleong (2005: 4). Seharusnya lebih mudah bagi peneliti untuk menemukan data yang relevan dan menarik kesimpulan jika fokus penelitian ini jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan teori kinerja terhadap pertanyaan seberapa baik pemerintah daerah Desa Sebamban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang pembangunan desa.

1. Hasil kerja secara kualitas

Adalah seberapa baik pemerintah desa mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

2. Hasil kerja secara kuantitas

Adalah berapa jumlah pemerintah desa bekerja dalam satu tahunnya.

Data primer, disebut juga informasi tangan pertama, adalah informasi yang belum disaring melalui perantara apapun dan telah dikumpulkan langsung dari sumbernya, biasanya melalui wawancara yang dipandu oleh penelitian sebelumnya. Metode *Sampling* Tujuan digunakan untuk memilih peserta dalam penelitian ini. Dimana yang menjadi key informan yaitu Kepala Desa Sebamban. Dan informan adalah : Kepala Desa, Ketua BPD, Kaur Pembangunan, Ketua LPM, dan Tokoh Masyarakat. Data Sekunder, Secara khusus, informasi diambil dari berbagai sumber tertulis seperti laporan, buku, dan arsip.

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data interaktif (*Interactive Model of Analysis*) Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:92), analisis data kualitatif memanfaatkan kegiatan secara interaktif dan berkelanjutan, menyeluruh, sehingga menghasilkan data kejenuhan. Proses paralel reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi adalah bagian dari analisis data kualitatif ini.

Hasil Penelitian

Kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan secara Kualitas di Desa Sebamban Kecamatan Muara Wis

Output seorang pekerja adalah tolok ukur utama yang digunakan

untuk mengevaluasi kompetensinya. Standar kerja seorang karyawan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti keterampilan dan pengalaman karyawan, didasarkan pada susunan internal individu. Sebaliknya, faktor eksternal adalah yang berasal dari luar sistem itu sendiri, dan mereka memberikan bantuan dalam bentuk sumber daya, infrastruktur, dan tujuan yang telah ditentukan untuk implementasi.

Padahal, banyak perangkat desa di Sebemban yang masih bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan lainnya yang terdaftar di paket C pendidikannya. Di tingkat kepala desa, pendidikan S1 lebih diutamakan karena terkait dengan perencanaan yang pada akhirnya mengarah pada keberhasilan pembangunan. Selain itu, terdapat kekurangan kemampuan karena hampir semua pekerja tidak pernah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan yang relevan dengan pekerjaannya. Demikian pula, kepala desa dan sekretaris harus memainkan peran yang lebih besar dalam inisiatif peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Modal manusia adalah istilah yang digunakan dalam manajemen modern untuk menggambarkan mereka yang berada dalam posisi otoritas dalam suatu komunitas; ini karena orang dipandang lebih dari sekadar sumber daya; mereka juga seorang pengemudi, dan ini membutuhkan kapasitas yang cukup.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan kualitas kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar desa masih kekurangan jumlah pejabat dengan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk pekerjaan mereka.

Pemerintah desa Sebemban sudah melakukan beberapa pembangunan-pembangunan untuk menunjang kesejahteraan dan membantu masyarakat dalam mempermudah kegiatan-kegiatan masyarakat di desa sebemban, seperti program jembatan tani dibangun untuk mempermudah masyarakat pergi ketempat bertani dan pembangunan puskesmas pembantu untuk membantu masyarakat lebih cepat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dari hasil kinerja pemerintah desa Sebemban sudah memberikan hasil kerja yang cukup baik dan membuat masyarakat semakin sejahteran karena selalu cepat dalam menyelesaikan pembangunan dan dari pegawai pemerintah desa selalu melakukan evaluasi dari program-program pembangunan desa sebemban.

Kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan secara kuantitas di Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis

Saat menjelaskan jumlah pekerjaan yang diselesaikan oleh pemerintah desa selama periode waktu tertentu, salah satu indikator yang berguna adalah jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai dalam jangka waktu tertentu. Lebih banyak hasil dapat diharapkan jika jumlah tugas yang dapat ditangani karyawan meningkat. Karyawan yang bertanggung jawab melakukan segala upaya untuk menyelesaikan tugas yang telah ditugaskan kepada mereka.

Para pekerja di kantor kelurahan Semban, menurut kajian, berupaya menghasilkan volume kerja yang cukup. Dimana setiap orang secara konsisten bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan sesuai spesifikasi atasannya. Namun kegiatannya lebih banyak pada pembangunan jalan atau akses untuk mempermudah masyarakat melakukan pekerjaan penduduk setempat, tetapi tidak memberikan kepada masyarakat untuk himbuan, perawatan dan pengawasan terhadap pembangunan yang sudah dilaksanakan sehingga ada beberapa bangunan yang belum maksimal digunakan dimana masyarakat ada bangunan yang masih bisa digunakan tetapi untuk pegawai pemerintah desa sebemban tetap melakukan pembangunan yang baru sehingga bangunan lama yang harusnya masih bisa digunakan hanya dibiarkan dan tidak dirawat. Selain itu ada pembangunan jembatan tani yang juga tidak dirawat oleh pemerintah desa dan tidak ada himbuan kepada masyarakat untuk bisa memelihara dan merawat. sehingga disini kurangnya sosialisasi pemerintah desa sebemban dan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk terus menjaga pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa sebemban.

Kinerja pemerintah desa Sebemban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dapat di deskripsikan dengan melihat dua hal yaitu kualitas kerja dan kuantitas kerja. Hasil gambaran kajian tentang kualitas kinerja pemerintah desa sebemban berdasarkan observasi dan wawancara menunjukkan cukup baik, namun masih perlu perbaikan dalam hal pengawasan dan pemeliharaan. Sedangkan untuk pengembangan masyarakat, Pemdes sudah menyelesaikan bangunan dalam jumlah yang cukup banyak, namun ada beberapa pembenahan pembangunan terkait dengan anggaran yang masih belum mencukupi.

Untuk faktor pendukung dari pembangunan yang telah dilakukan di desa Sebemban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Pemerintah desa telah memberikan hasil kerja yang sangat baik dimana pemerintah desa selalu cepat dalam menyelesaikan pembangunan dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan serta pemerintah kabupaten. Sehingga dengan adanya anggaran tersebut tersediannya bahan-bahan bangunan untuk proses pelaksanaan atau kegiatan pembangunan Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai

Kartanegara. Selain itu adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pembangunan di Desa Sebamban.

Untuk faktor penghambat dari pembangunan yang telah dilakukan di desa Sebamban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran pemerintah untuk selalu merawat dan menjaga bangunan dan tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai bidang kerjanya. Serta tidak adanya anggaran yang disediakan untuk melakukan perawatan terhadap bangunan yang telah dibangun.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Temuan berikut diambil dari kajian efektivitas pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa Sebamban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Pegawai di Kantor Desa Sebamban Kecamatan Muara Wis telah menunjukkan kinerja yang cukup baik di bidang-bidang seperti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan koordinasi upaya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat; peningkatan lebih lanjut di bidang-bidang tersebut, serta kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menjaga dan merawat pembangunan fisik, dapat dicapai dengan meningkatkan tingkat partisipasi aktif anggota masyarakat dalam upaya tersebut.
2. Faktor Pendukung Kinerja telah memberikan hasil kerja yang sangat baik dimana pemerintah desa selalu cepat dalam menyelesaikan pembangunan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Sedangkan Faktor penghambat kinerja di desa Sebamban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara masih di pengaruhi faktor internal seperti factor kesadaran dan kemauan dan faktor external yakni kepemimpinan pemerintahannya sendiri.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, kami mengusulkan beberapa perubahan cara kerja pemerintahan desa, antara lain: meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan pembangunan; menganalisis potensi dan kendala desa dalam pembangunan; dan mengembangkan ide atau strategi baru untuk memberdayakan masyarakat desa, harus mampu menciptakan ide- ide atau gagasan bagi program pembangunan yang inovatif, mampu mengadakan forum-

forum diskusi terkait pembangunan untuk membuka wawasan serta mampu mengoptimalkan potensi desa sehingga dapat menambah pendapatan desa.

Daftar Pustaka

- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan PemerintahnDesa*, Erlangga, Jakarta.
- Lexy, Moleong, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung.
- Nasution, Zulkarimen, 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Sondang, P.Siagian, 2005. *Administrasi pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif, dan kontruktif*, Alfabeta, Bandung

Dokumen-dokumen

- Peraturan Pemerintah No 43 / 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/ 2014tentang Desa
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa